

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (*corporate governance framework*). Kerangka tersebut dibentuk hukum dan regulasi, anggaran dasar, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan, konsumen dan lain sebagainya. Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, *shareholders*, dan *stakeholders* perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Good corporate governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2001) dalam Surya dan Yustiavandana (2006). Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.

Awalnya, isu *good corporate governance* timbul karena berkembangnya bentuk perseroan, terutama karena perseroan itu *go public*, sehingga pemilik perusahaan pada umumnya tidak menjadi pengelola atau manajemen perusahaan. Dalam kondisi seperti itu timbul masalah keagenan, yaitu menjamin bahwa manajemen akan selalu bertindak dalam kepentingan

pemilik perusahaan dan pihak–pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal salah satu cara yang perlu dilakukan adalah melalui manajemen perusahaan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, prinsip-prinsip *good corporate governance* memegang peranan penting, sebagai sarana untuk mengukur kinerja suatu perusahaan.

Untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*, muncul suatu ide tentang “organ tambahan” dalam struktur perseroan. Organ-organ tambahan tersebut diantaranya adalah komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Keberadaan 4 (empat) organ tambahan ini diharapkan dapat menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik (Surya dan Yustiavandana, 2006)

Darmawati (2004) dalam penelitian Raharaja (2011) menyatakan *good corporate governance* menjadi sesuatu yang lebih penting dalam kondisi krisis keuangan karena dua alasan. Pertama, ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas menjadi lebih parah pada periode krisis. Kedua, krisis dapat mendorong para investor untuk lebih memperhatikan pentingnya penerapan *good corporate governance*. Mekanisme *good corporate governance* memiliki beberapa indikator yang berupa komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan latar belakang pendidikan komisaris. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji

keterkaitan antara mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Hasil dari kinerja harus dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus akan terjamin kelangsungan hidupnya karena akan mendapat kepercayaan dari publik, sehingga publik akan merasa nyaman untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan perlu dilakukan penilaian kinerja (Achieman,1996) dalam Inayah (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang disusun dalam setiap akhir periode yang berisi tentang pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan institusional). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Pozen (1994) dalam penelitian Rustandi (2013) mengungkapkan beberapa metode yang digunakan oleh pemilik institusional dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan manajerial. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifani (2010), tentang *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan menunjukkan hasil bahwa mekanisme *good corporate governance* dalam hal ini adalah komite audit, komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosyada (2010) menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada kepemilikan institusional. Arifani (2010) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil yang diperoleh pada penelitian Rosyada (2010) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Badan usaha milik negara BUMN merupakan sarana bagi pemerintah melayani rakyatnya. Berdasarkan peran tersebut BUMN senantiasa diawasi pemerintah khususnya dibawah pengawasan kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN-RI). BUMN sebagai perusahaan milik negara mempunyai karakteristik khusus, tidak hanya menyangkut

kepemilikannya oleh negara tetapi juga peran yang diembannya sebagai pelaku bisnis yang melaksanakan fungsi komersial dan sekaligus sebagai “*Agen of Development*” yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) (Gusnardi 2006) dalam Scott (2009).

Contoh kasus yang tampak jelas kurang efektifnya *good corporate governance* terjadi pada PT. Waskita Karya Persero terkait kelebihan pencatatan (*overstate*) laba bersih pada laporan keuangan 2004-2007. Kasus *overstate* ini terbongkar setelah ditemukannya pencatatan yang tidak sesuai oleh direktur utama PT. Waskita Karya saat melakukan pemeriksaan kembali ke neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu. Sekretaris kementerian BUMN menyatakan kasus ini muncul sebagai akibat kedekatan persero dengan kantor akuntan publik. Karena itu dia mengusulkan agar seluruh BUMN menjaga hubungannya dengan kantor akuntan publik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang melakukan internal kontrol mulai dari dewan komisaris sampai dengan internal audit tidak melakukan fungsinya dengan baik. Dengan buruknya tata kelola perusahaan maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru

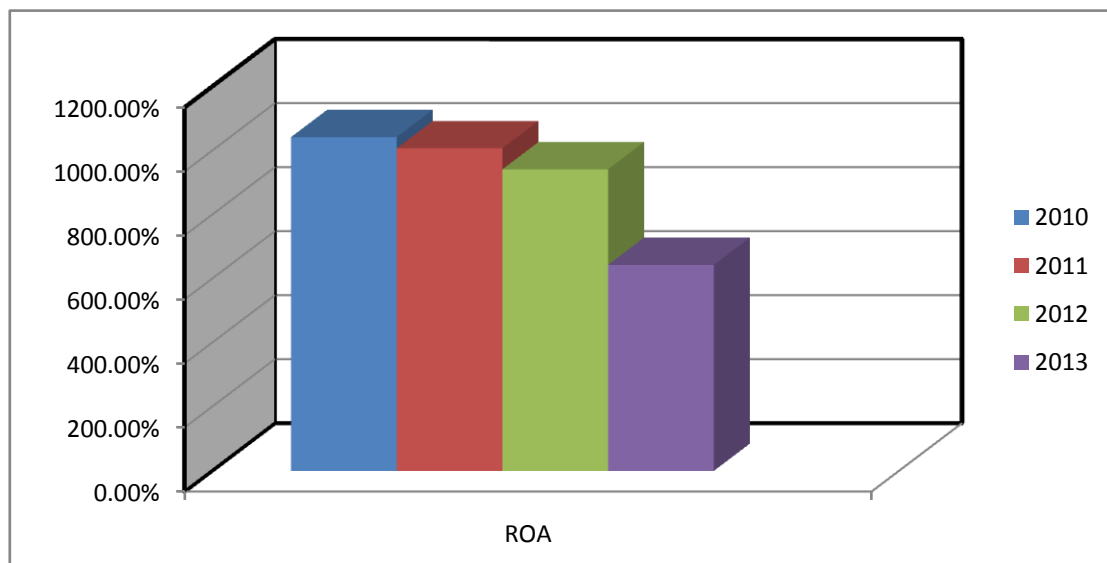
juga enggan melakukan investasi. Pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan akan menurun.

Kasus lain pada Bank Indonesia menemukan 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum memenuhi ketentuan *good corporate governance*. Hasil evaluasi ini diperoleh dari percobaan Bank Indonesia mengenai penerapan beberapa pasal dari ketentuan GCG terhadap industri perbankan di Indonesia. Evaluasi dilakukan terhadap 101 bank pada periode September 2007. Penyebab belum terpenuhi ketentuan GCG antara lain 53,5% bank belum memiliki komisaris independen sesuai dengan ketentuan, 30,7% bank belum membentuk komite secara lengkap dan 18,8% bank belum memiliki jumlah komisaris lebih besar dari jumlah direksi.

Permasalahan BUMN sebagai perusahaan juga menjadi permasalahan dari *good corporate governance* di BUMN, sehingga menjadi *concern* semua pihak untuk menjalankan GCG sebagai usaha memecahkan permasalahan di BUMN. Adapun permasalahan tersebut adalah belum maksimalnya nilai BUMN sebagai perseroan dan nilai perseroan bagi pemegang saham, belum dikelolanya BUMN secara efisien, transparan dan profesional seperti terlihat dari belum diberdayakannya kemandirian organ perseroan (RUPS, komisaris dan direksi), dan belum sejalanannya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan tindakan organ perseroan yang didasari nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Patriadi, 2004).

Usaha pemerintah untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia (termasuk BUMN) untuk terjun dipasar modal adalah salah satu cara pemerintah untuk mencoba menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan publik diluar kepemilikan pemegang saham lama (biasanya keluarga atau pemerintah untuk BUMN) maka diharapkan kontrol terhadap perusahaan akan menjadi lebih baik sehingga pada gilirannya nanti kinerja perusahaan akan meningkat (Syahroza, 2000) dalam Patriadi (2004). Namun demikian, realitas menunjukkan meskipun perusahaan telah terjun ke pasar modal tetapi kinerja perusahaannya masih jauh dari harapan.

Berikut ini adalah *good corporate governance* dan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan yakni *return on asset* (ROA) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013:



Gambar 1. Persentase Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan ROA pada perusahaan BUMN

Pada tahun 2010 Roa pada perusahaan BUMN adalah 1043.00%. Kemudian Pada tahun 2011 Roa pada perusahaan BUMN mengalami penurunan menjadi 1008.27%. Pada tahun 2012 Roa pada perusahaan BUMN masih tetap mengalami penurunan hingga 942.45%. Kondisi ini masih terus berlangsung sampai pada tahun 2013 menjadi 643.73%

Berdasarkan data-data diatas dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti mengangkat judul ***“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013”***

1.2. Identifikasi Masalah

Good corporate governance adalah tata kelola yang baik. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan mendapatkan kepercayaan dari para investor. Dalam pelaksanaan fungsi *good corporate governance* organ-organ perusahaan memiliki peran yang penting. Organ-organ perusahaan ini terdiri dari komisaris independen dan komite audit. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh organ-organ perusahaan ini akan meningkatkan kinerja keuangan. Perusahaan akan lebih transparan, adil, dan bertanggungjawab. Belum diberdayakannya organ perseroan (komisaris independen, dan komite audit) dapat menimbulkan resiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan meningkatkan harga saham perusahaan dalam jangka panjang.

Bank Indonesia menemukan 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum memenuhi ketentuan *good corporate governance*. Belum terpenuhinya ketentuan *good corporate governance* pada bank Indonesia dapat dilihat dari 53,5% bank yang belum mempunyai komisaris independen sesuai dengan ketentuan, 30,7% bank yang belum membentuk komite secara lengkap dan 18,8% bank belum memiliki jumlah komisaris lebih besar dari pada jumlah direksi.

Berdasarkan data kinerja keuangan *return on asset* (ROA) pada perusahaan BUMN, pada tahun 2011-2013 ROA pada perusahaan BUMN terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi akibat dari kurang efektifnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
2. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?

3. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?

1.4. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2013
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2013
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2013
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2013

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Bagi Perusahaan sehubungan dengan adanya *good corporate governance*, dapat memberikan masukan tentang pentingnya menerapkan corporate governance pada perusahaan agar resiko rekayasa laporan keuangan semakin kecil.
- b. Bagi penulis untuk memperoleh pengalaman penelitian serta gambaran yang sesungguhnya tentang penerapan prinsip GCG yaitu dalam hal pengembangan teori, hasil tinjauan pustaka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian lainnya
- c. Bagi perguruan tinggi untuk memperoleh bahan masukan dan umpan balik guna perbaikan dunia pendidikan serta menambah referensi tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pembandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan fakta di lapangan. Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan sebagai pengembangan.